

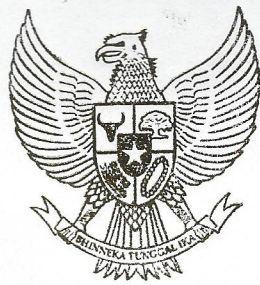
**RENCANA KERJA  
(RENJA)**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG**

**TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**  
JL. Surohadikusumo No. 1 — Pemalang  
**2023**



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 050 /202/ TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam tahapan persiapan penyusunan Rencana Kerja, perangkat daerah menyusun Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang ;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja; dan
  - b. merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 sesuai tahapan dan tatacara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Bupati Pemalang melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 24 Mei 2023

Plt. BUPATI PEMALANG  
WAKIL BUPATI



MANSUR HIDAYAT

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG  
 NOMOR : 050/202 /TAHUN 2023  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA  
 KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
 KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA  
 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
 KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024

NO	Kedudukan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Ketua	
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Sekretaris	
3.	Kasubag Bina Program dan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
4.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
5.	Kabid Jabatan dan Penilaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
6.	Kabid Mutasi dan Pembinaan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
7.	Kabid Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
8.	Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	Nurkholik, S.E.
9.	Analisis Kepegawaian Penyelia pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	Arief Warjito
10.	Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	Mohammad Tarmanto

11.	Pengadministrasi Pelatihan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	Teguh Leksono, S.M.
12.	Pengelola Barang Milik Negara pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	Rokhidin, S.A.P.
13.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	Rohwati, S.E., M.M.

Plt. BUPATI PEMALANG  
WAKIL BUPATI



MANSUR HIDAYAT

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BKD  
KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR : 050/202/2024  
TENTANG : RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN  
2024

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengamanatkan pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh daerah masing-masing sesuai otonomi daerah yang mengiringinya. Hal ini membawa konsekuensi terjadinya perubahan atas penyempurnaan mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisiensi dan efektif.

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah salah satunya adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Tindak lanjut oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD) yang adapada Pemerintah Daerah adalah penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RenjaPD) sebagai perencanaan yang bersifat tahunan dengan mendasarkan pada RKPD sebagai salah satu pedomannya.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan secara terus menerus untuk mewujudkan kondisi yang ideal melalui capaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan serta dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai tahapan yang telah direncanakan didasarkan pada kondisi yang ideal. Dalam proses pembangunan, sumberdaya yang dimiliki berusaha untuk dimanfaatkan seefektif dan semaksimal mungkin guna mendapatkan hasil yang maksimal.

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu perumusan alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data-data serta fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktifitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Kualitas perencanaan memegang peran penting dalam menentukan tingkat keberhasilan proses pembangunan. Sedangkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah disusun dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah dan memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan termasuk di dalamnya perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai penjabaran RPJPD dan memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan strategi dan indikasi program 5 tahun secara lintas pembiayaan.
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan dan merupakan kompilasi kritis atas Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) setiap tahun anggaran.

Sedangkan Perangkat Daerah (PD) menyusun 2 (dua) dokumen perencanaan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJPN 2005-2025 mengamanatkan pencapaian visi “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Sementara itu visi pembangunan daerah dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 adalah Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari. Sedangkan visi pembangunan daerah Kabupaten Pemalang dalam RPJPD Kabupaten Pemalang 2005-2025 adalah Kabupaten Pemalang yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Secara umum amanat yang dikandung dalam visi pembangunan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah maupun pembangunan nasional merupakan wujud dari tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai UUD 1945.

RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 saat ini memasuki tahap keempat periode tahun 2021-2025 dengan fokus pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi terus meningkat.

Demikian pula dengan RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 yang saat ini memasuki tahapan lima tahun keempat (tahun 2021-2025) dengan prioritas pembangunan daerah pada fokus :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas serta mampu mendukung eksistensi pembangunan daerah;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) demokratis dan bertanggung jawab sejalan dengan peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur;



4. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah;
5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsi dalam menopang kehidupan masyarakat;
6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejuk dan damai didukung oleh penegakan supremasi hukum.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038;
21. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang;
22. Peraturan Bupati Pemalang Nomor .... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Dalam rangka menyusun arah dan kebijakan Perangkat Daerah tahun anggaran 2024, setiap tahunnya Perangkat Daerah perlu Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Arah dan kebijakan Perangkat Daerah tersebut disusun melalui prioritas program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah yang diampunya. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi dasar pelaksanaan APBD Tahun 2024 guna mendukung kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **1.3.1. Maksud**

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk :

- 1) Memberikan acuan resmi bagi Badan Kepegawaian dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024.
- 2) Memberikan arah dan pedoman bagi jajaran di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang dalam menentukan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Menjadi media akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang sebagai penyelenggara Pemerintahan yang baik

### **1.3.2. Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 adalah :

- a. Memasukan Program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam kebijakan umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2024.
- b. Merumuskan arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan pemerintah di bidang Kepegawaian dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang serta mengatasi kelemahan dan hambatan.
- c. Merumuskan indikator pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah selama satu tahun.
- d. menjaga kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan serta Menjamin tercapainya sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Terdiri dari Latar Belakang penyusunan Renja, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Renja Perangkat Daerah

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Menyajikan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program Kegiatan dari Masyarakat.;

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Menyajikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, dan Program dan Kegiatan.

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB V PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Hasil Evaluasi Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2023. Badan kepegawaian daerah melaksanakan 2 program yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota dan program kepegawaian. Program penunjang urusan pemerintahan daerah terdiri dari 7 kegiatan dan 18 sub kegiatan dengan mendapat anggaran APBD sebesar Rp 8.185.103.468,- dan program kepegawaian Terdiri dari 4 kegiatan dan 19 sub kegiatan dengan mendapat anggaran APBD sebesar Rp. 5.945.021.782,- sehingga total anggaran APBD tahun 2023 pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 14.130.125.250,-. Capaian kinerja dan realisasi anggran tahun 2023 sampai dengan triwulan 2 tahun 2023 sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD2023		% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2022 TW II	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota - Nilai Sakip - IRB	51  60,4	8.185.103.468	62,7	51,33	ST	ST
2.	Program Kepegawaian Daerah - <i>indeks Profesionalitas ASN</i>	65,59	5.945.021.782	79,3	38,15	ST	ST
Rata-rata				71	44,74	ST	ST

Keterangan: SR (Sangat Rendah), R (Rendah), Sedang (S); T (Tinggi), ST (Sangat tinggi)

Pada tabel di atas penilaian kinerja dilakukan sampai dengan triwulan II. Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2023 di atas menyebutkan bahwa tingkat capaian kinerja secara keseluruhan sudah di atas 50%. sedangkan capaian kinerja sub kegiatan yang kurang dari 50% dikarenakan beberapa kegiatan masih berjalan dan beberapa kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV. Berikut ini adalah rekapitulai evaluasi hasil pelaksanaan Renja BKD sampai dengan Triwulan II tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL RENJA BKD KABUPATEN PEMALANG DAN PENCAPAIAN RENSTRA  
BKD KABUPATEN PEMALANG S/D TAHUN 2023**

No.	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023								Capaian Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra OPD (Tahun 2023) %	
							I		II		Total			
								Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	5.03	Kepegawaian												
	5.03.04	Badan Kepegawaian Daerah			30.647,00	14.130.125.250	15.760	2.661.637.425	8.502,00	4.192.920.147	24.262	6.469.295.311	79,17	45,78
	5	Unsur penunjang urusan pemerintahan			298,00	8.185.103.468	96	1.816.030.205	104,00	2.492.262.716	200,00	4.201.092.450	67,11	51,33
			RB dan SAKIP	Nilai										
1	5.03.01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran , pengendalian, laporan		4	12.500.000	1	29.250	2	4.472.750	3	4.502.000	75	36,02

			<b>Kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD</b>											
1	5.03.01.2..01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	4,00	12.500.000	1	29.250	2	4.472.750	3	4.502.000	75	<b>36,02</b>
8	5.03.01.2.02	<b>Admnistrasi Keuangan perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tersusunnya dokumen administrasi keuangan Perangkat daerah yang tepat waktu</b>		12,00	<b>7.080.474.500</b>	3	<b>1.538.401.873</b>	3	<b>2.268.432.534</b>	6	<b>3.806.834.407</b>	50	<b>53,77</b>
	5.03.01.2.02.01	penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12,00	7.080.474.500	3	1.538.401.873	3	2.268.432.534	6	3.806.834.407	50	53,77
	5.03.01.2.05	<b>Admnistrasi Kepegawaian perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>		<b>70,00</b>	<b>45.639.600-</b>		<b>-</b>	<b>56</b>	<b>42.546.000</b>	<b>56</b>	<b>42.546.000</b>	80	<b>93,22</b>

	5.03.01.2.05.10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah penyelenggara dan jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	70,00	45.639.600-	-	56	42.546.000	56	42.546.000	80	93,22
<b>20</b>	<b>5.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>91,00</b>	<b>447.862.35038</b>	<b>151.897.628</b>	<b>20</b>	<b>73.458.934</b>	<b>58</b>	<b>151.897.608</b>	<b>64</b>	<b>33,92</b>
22	5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Paket	8,00	4.330.0007	1.265.000	-	540.000	7	1.805.000	88	41,69
25	5.03.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	jenis bahan logistik kantor yang tersedia	Paket	35,00	214.815.85015	20.063.700	10	22.635.934	25	42.699.634	71	19,88
26	5.03.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan yang tersedia, jumlah penggandaan yang tersedia	Paket	2,00	18.884.0002	1.391.000	-	5.232.500	2	6.623.500	100	35,07

28	5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang tersedia, jumlah surat kabar yang tersedia	dokumen	2,00	13.250.000	2	4.700.000	-	2.100.000	2	6.800.000	100	51,32
4	5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi	laporan	4,00	5.742.500	2	580.000	-	-	2	580.000	50	10,10
34	5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	laporan	40,00	190.840.000	10	50.438.974	10	42.950.500	20	93.389.474	50	48,94
5	5.03.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>3,00</b>	<b>19.544.000-</b>		<b>-</b>	<b>2,00</b>	<b>1.233.000,00</b>	<b>2</b>	<b>1.233.000</b>	<b>67</b>	<b>6,31</b>
36	5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	laporan	3,00	19.544.000-		-	2	1.233.000	2	1.233.000	67	6,31
38	5.03.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>			<b>20,00</b>	<b>310.744.700</b>	<b>8</b>	<b>67.611.437</b>	<b>4</b>	<b>68.377.998</b>	<b>12</b>	<b>135.989.435</b>	<b>60</b>	<b>43,76</b>



		<b>Pemerintahan Daerah</b>												
39	5.03.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	3,00	3.700.000-	514.000	1	863.400	1	1.377.400	33	37,23	
40	5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumbe daya air dan listrik yang disediakan	laporan	5,00	170.921.5005	34.909.437	-	39.772.725	5	74.682.162	100	43,69	
41	5.03.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12,00	136.123.2003	32.188.000	3	27.741.873	6	59.929.873	50	44,03	
<b>16</b>	<b>5.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>98,00</b>	<b>268.338.31846</b>	<b>58.090.017</b>	<b>17</b>	<b>33.741.500</b>	<b>63</b>	<b>58.090.000</b>	<b>64</b>	<b>21,65</b>	

42	5.03.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	40,00	37.700.000	20	9.793.000	5	3.255.000	25	13.048.000	63	34,61
43	5.03.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	40,00	25.214.650	20	4.507.000	5	6.998.500	25	11.505.500	63	45,63
44	5.03.01.2.09.03	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	Jumlah pemeliharaan serta perizinan alat besar operasional	Unit	1,00	30.150.000	-	-	1	10.679.000	1	10.679.000	100	35,42
46	5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	Unit	15,00	133.726.400	5	3.945.000	5	10.419.000	10	14.364.000	67	10,74

48	5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	Unit	2,00	41.547.268	1	6.103.500	1	2.390.000	2	8.493.500	100	20,44
		<b>Program Kepegawaian</b>			<b>30.349,00</b>	<b>5.945.021.782</b>	<b>15.664</b>	<b>845.607.220</b>	<b>8.398</b>	<b>1.700.657.431</b>	<b>24.062</b>	<b>2.268.202.861</b>	<b>79</b>	<b>38,15</b>
49	5.03.02.2.01	Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN			22.751,00	1.616.000.000	8.991	312.297.320	7.071	278.054.719	16.062	312.290.249	71	19,32
17	5.03.02.2.01.02	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah dokumen ABK, formasi ASN, dan usulan kebutuhan formasi	Dokumen	1,00	285.000.000	-	16.204.448	1	57.265.000	1	73.469.448	100	25,78
51	5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah fasilitasi pengadaan PNS dan PPK	Dokumen	1,00	1.005.000.000	-	4.696.082	1	124.586.220	1	129.282.302	100	12,86
			Jumlah Fasilitasi Pengadaan PND dan PPPK	Kegiatan	1,00	-	-	-	1	-	1	-	100	-

54	5.03.02.2.01.06	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah dokumen administrasi pemberhentian	sk	610,00	110.000.000	147	2.295.000	100	33.367.999	247	35.662.999	40	32,42
57	5.03.02.2.01.10	Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Jaringan internet server 30	bulan	12,00	86.000.000	3	8.880.000	3	15.438.000	6	24.318.000	50	28,28
			jumlah sistem informasi	Modul	1,00	-			1		1	-	100	
			Media Q dan A	Bulan	12,00		3		-		3	-	25	25,00
58	5.03.02.2.01.11	Pengelolaan data kepegawaian	jumlah dokumen elektronik	Dokumen	6.000,00	100.000.000	2.468	2.160.000	1.417	26.947.500	3.885	29.107.500	65	29,11
			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur/jumlah kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja	dokumen	10.000,00		3.898		4.027		7.925	-	79	
			jumlah kegiatan penghitungan	kegiatan	12,00		3		3		6		50	-
			jumlah tata naskah	lembar	6.000,00		2.468		1.417		3.885		65	

59	5.03.02.2.01.12	Evaluasi data, informasi dan sistem kepegawaian	jumlah buku ASN yang disusun dalam angka/jumlah evaluasi data informasi dan sistem informasi kepegawaian	buah	100,00	30.000.000-	-	-	100	20.450.000	100	20.450.000	100	68,17
			jumlah evaluasi data	Kegiatan	1		1		-		1		100	-
<b>60</b>	<b>5.03.02.2.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>			<b>683</b>	<b>993.595.000</b>	<b>118</b>	<b>30.645.400</b>	<b>11</b>	<b>350.534.592</b>	<b>129</b>	<b>381.179.992</b>	<b>19</b>	<b>38,36</b>
61	5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN pelaksana yang di mutasi, ASN struktural yang di mutasi	PNS	520	100.000.000	18	6.211.000	-	13.235.500	18	19.446.500	3	19,45
			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrai, jabatan pelaksana dan	dokumen	5		-						-	

			mutasi ASN antar daerah											
62	5.03.02.2.02.02	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan Gaji Berkala ASN, jumlah pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	12	203.595.000	3	3.570.000	3	34.547.900	6	38.117.900	50	18,72
			Jumlah pengelolaan	Dokumen	2		1		1		2	-	100	
63	5.03.02.2.02.03	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah PNS yang promosi	PNS	140	690.000.000	92	20.864.400	7	302.751.192	99	323.615.592	71	46,90
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	dokumen	4		4		-		4		100	-
<b>64</b>	<b>5.03.02.2.03</b>	<b>Pengembangan kompetensi ASN</b>			<b>2.474</b>	<b>2.548.570.782</b>	<b>649</b>	<b>472.878.000</b>	<b>773</b>	<b>951.559.140</b>	<b>1.422</b>	<b>1.424.437.140</b>	<b>57</b>	<b>55,89</b>
18	5.03.02.2.03.01	Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Jumlah dokumen AKPK/jumlah PNS yang mengikuti	Dokumen	235	50.000.000	-	4.804.500	-	400.000	-	5.204.500	-	10,41

			UKPPI dan ujian dinas											
65	5.03.02.2.03.02	Pengelolaan assesment center	Jumlah PNS yang mengikuti assesment	PNS	500	200.000.000	16	4.088.500	167	15.497.500	167	19.586.000	33	9,79
			jumlah dokumen	dokumen	1		-		-				-	
	5.03.02.2.03.04	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan lanjutan ijin belajar, tugas belajar	orang	3	647.950.500	18	210.926.500	4	410.317.500	22	621.244.000	733	95,88
	5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	Jumlah dokumen kerjasama/jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/jumlah PPPK yang	orang	1.735	1.650.620.282	615	253.058.500	602	525.344.140	1.217	778.402.640	70	47,16

			mengikuti orientasi											
<b>5.03.02.2.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>				<b>4.441</b>	<b>786.856.000</b>	<b>5.906</b>	<b>29.786.500</b>	<b>543</b>	<b>120.508.980</b>	<b>6.449</b>	<b>150.295.480</b>	145	19,10
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Dokumen	1	318.056.000	-	14.254.500	-	73.315.950	-	87.570.450	-	27,53	
		jumlah kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja	Kegiatan	2	-	-	-	1	-	1	-	50		
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah PNS yang mendapatkan pelayanan kesehatan/jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan	PNS	1.000	263.800.000	300	740.000	120	35.871.979	420	36.611.979	42	13,88	
			PNS	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			PNS	2.800	-	5.600	-	-	-	-	-	-	-	



				PNS	400			400		400		100	
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan tanda jasa bagi pegawai	Jumlah tanda jasa yang disusulkan	PNS	150	40.000.000-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03.02.2.04.07	Pembinaan disiplin ASN	Jumlah kegiatan pembinaan disiplin	uji kesehatan	5	105.000.000-	2.025.000	-	4.855.851	-	6.880.851	-	6,55	
		seminar	kegiatan	1			-		-		-		
			kegiatan	36			-		-		-		
									-		-		
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah penyelesaian pelanggaran disiplin	Kasus	20	30.000.000 <sup>6</sup>	12.317.000	6	5.415.200	12	17.732.200	60	59,11	
5.03.02.2.04.09	Pelayanan proses izin perceraian pegawai	Jumlah penyelesaian proses ijin perceraian	Kasus	20	30.000.000-	450.000	16	1.050.000	16	1.500.000	80	5,00	

Pada tabel di atas capaian kinerja keuangan dan kinerja sub kegiatan masih terdapat beberapa sub kegiatannya yang capaiannya di bawah 50% hal ini disebabkan kegiatan pelaksanaannya pada triwulan III dan IV.

Berikut disajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2023 rata-rata tingkat capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama BKD Kabupaten Pemalang untuk triwulan I hingga triwulan II sampai saat ini nilai dari BKN belum rilis sehingga masih digunakan realisasi tahun 2022. Realisasi kinerja tahun 2022 menggunakan penilaian mandiri yang dilakukan oleh BKD Kabupaten Pemalang dikarenakan sampai saat berakhirnya tahun anggaran 2022 nilai sampai dengan triwulan IV belum rilis, capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama dapat dilihat sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022 (Penilaian Mandiri)				
		TARGET	Nilai IP ASN 2022	CAPAIAN (%)	TARGET AKHIR RPJMD (2022)	CAPAIAN S.D 2022 (%)
1.	Indeks Profesionalitas ASN	64,61	63,05	97,58	65,59	96,13
2.	Persentase Kompetensi ASN	57,20	19,98	34,93	58,40	34,21
3.	Persentase Kinerja ASN	80,30	25	31,13	80,30	31,13
4.	Persentase Tingkat Pendidikan ASN	50,60	13,09	25,87	52,60	24,89
5.	Persentase Disiplin ASN	99,7	4,99	5,01	99,7	5,01

Tabel di atas adalah perhitungan capaian kinerja berdasarkan nilai IP ASN Tahun 2022 dibanding dengan target kinerja tahun 2022 di kali 100%. Sedangkan untuk menghitung indeks profesionalitas ASN menggunakan pedoman Peraturan Kepala BKN RI Nomor 8 Tahun 2019 dengan menggunakan skala nilai Tingkat Profesionalitas ASN yaitu sebagai berikut :

No.	Kategori Rentang Nilai Tingkat Profesionalitas ASN	Sebutan Tingkat Pofesiohnalitas ASN
1.	91-100	Sangat Tinggi
2.	81 – 90	Tinggi
3.	71 – 80	Sedang
4.	61 – 70	Rendah
5.	60 ke bawah	Sangat Rendah

Hasil perhitungan IP ASN secara mandiri pada BKD kabupaten Pemalang untuk Indeks Profesionalitas ASN memiliki capaian nilai 97,58% yaitu hasil dari nilai IP ASN tahun 2022 63,05 dibanding dengan target 2022 yaitu 64,61, sehingga jika di terapkan pada rentang nilai berada pada rentang nilai 91- 100 sehingga pada sebutan tingkat profesionalitas ASN adalah Sangat Tinggi. Sedangkan pada indicator persentase kompetensi ASN, persentase kinerja ASN, persentase tingkat pendidikan ASN dan persentase tingkat kedisiplinan ASN pengukurannya berdasarkan Peraturan Kepala BKN RI Nomor 8 Tahun 2019 dengan menggunakan bobot pengukuran dimensi profesionalitas ASN sebagai berikut :

No.	Dimensi Pengukuran	Bobot
1.	Kompetensi	40 %
2.	Kinerja	30 %
3.	Kualifikasi	25 %
4.	Disiplin	5 %

Pada dimensi pengukuran indicator kompetensi memiliki bobot sebesar 40% sedangkan capaiannya sebesar 34,93% pada indicator persentase kompetensi ASN lebih kecil dari pada bobot yang berarti pada indicator persentase kompetensi ASN belum mencapai target. Pada indicator persentase kinerja ASN memiliki bobot sebesar 30% sedangkan capaian kinerjanya sebesar 31,13% sehingga pada indicator persentase kinerja ASN telah mencapai target. Pada indicator persentase tingkat pendidikan ASN memiliki bobot sebesar 25% dan capaian dari indicator persentase tingkat pendidikan ASN sebesar 25,87% sehingga pada indicator ini telah mencapai target. Pada indicator persentase disiplin ASN memiliki bobot 5% sedangkan capaiannya sebesar 5,01% sehingga pada indicator persentase disiplin ASN telah mencapai target.

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2022 berdasarkan capaian indiaktor kinerja utama BKD Kabupaten Pemalang dari lima indikator hanya satu yang tidak tercapai yaitu pada indicator persentase kompetensi ASN hal ini disebabkan karena Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Pemalang hanya sebagai fasilitator diklat bukan sebagai penyelenggara serta sebagian besar pengelola kepegawaian instansi kabupaten Pemalang tidak mengupload sertifikat / surat tugas/sejenisnya ke system sebagai bukti mengikuti pendidikan pelatihan seperti seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya yang digunakan sebagai dasar perhitungan kompetensi ASN.

Pengukuran target capaian relaisasi kinerja Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 belum bisa dilaksanakan dikarenakan BKN sampai dengan Triwulan II belum merilis nilai Indeks Profesionalitas ASN.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang**

Tahun 2023 masih terdapat Layanan Kepegawaian Terintegrasi (SIPINTER) di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang yang mengintegrasikan 24 jenis pelayanan di bidang kepegawaian. Layanan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang sebagai lembaga pengelola kepegawaian sebagai berikut :

1. Jabatan Struktural;
2. Jabatan fungsional;
3. Jabatan Pelaksana;
4. Kenaikan gaji berkala;
5. Kenaikan pangkat;
6. Kinerja (SKP);
7. Aplikasi Kepegawaian;
8. Persuratan;
9. Absensi;
10. Penghargaan;
11. Karpeg,KPE,Karis/Karsu;
12. Cuti
13. LP2P/LHKPN;
14. Formasi;
15. Pemindahan;
16. SPPD/Legalisir;
17. Ijin Cerai;
18. Pensiun;
19. Disiplin;
20. Ujian Dinas/UKPPI;

21. Ijin/Tugas Belajar;
22. Ijin Gelar;
23. Diklat;
24. CPNS/Aduan/Gugatan

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kepegawaian Daerah**  
**Kabupaten Pemalang**

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				(thn n-3)	(tnn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn-1 n)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	7	8	8	8	9	10	11		12	13
1	Terlaksananya jumlah surat yang tersampaikan (surat)	-	-	8000 surat, 4 orang	8000 surat, 4 orang	10 surat	3 jenis	8000 surat, 4 orang	7175 surat, 4 orang	2 surat	3 jenis	3 laporan	
2	Terlaksananya pemenuhan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang tersedia (bulan)	-	-	10 bulan (3 jenis)	12 bulan (3 jenis)	3 rekening	5 rekening	10 bulan (3 jenis)	12 bulan (3 jenis)	3 rekening	5 rekening	12 laporan	
3	Jumlah jasa peralatan perlengkapan kantor yang tersedia selama 1 tahun	-	-	-	-	150 unit	-	-	-	145 unit	-	-	
4	Terlaksananya jumlah pasien yang terlayani dengan baik (orang)	-	-	700 pasien	700 pasien	-	-	700 pasien	664 pasien	-	-	-	
5	Terlaksananya jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik (unit)	-	-	30 unit	38 unit	78 kali	40 unit	30 unit	26 unit	66 kali	40 unit	40 unit	

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
				(thn n-3)	(tnn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn-1 n)	(thn n)	(thn n+1)		
1	2	3	4	7	8	8	8	9	10	11		12	13	
6	Jumlah laporan yang tersusun tepat waktu	-	-	12 laporan	12 laporan	-	-	12 laporan	12 laporan	-	-	-	-	
7	Terlaksananya jumlah kantor yang dibersihkan dengan baik (unit)	-	-	11 bulan, 3 orang	10 bulan, 3 orang	-	-	11 bulan, 3 orang	10 bulan, 3 orang	-	-	-	-	
8	Terpenuhinya peralatan kerja yang diperbaiki (kali)	-	-	10 bulan	12 bulan	-	-	10 bulan	12 bulan	-	-	-	-	
9	Terpenuhinya jumlah alat tulis kantor yang tersedia (paket)	-	-	1 paket	1 paket, 76 buah	-	-	1 paket	1 paket, 67 buah	-	-	-	-	
10	Terlaksananya pemenuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (paket)	-	-	1 paket	1 paket cetakan, 5 buah, 500 lbr, 20 buah	5 paket	12 paket	1 paket	1 paket cetakan, 5 buah, 423 lbr, 17 buah	4 paket	12 paket	2 paket		
11	Terpenuhinya jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia (paket)	-	-	1 paket	2 paket	12 bulan	8 jenis	1 paket	2 paket	10 bulan	8 jenis	8 paket		

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				(thn n-3)	(tnn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn-1 n)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	7	8	8	8	9	10	11		12	13
12	Terpenuhinya jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (unit)	-	-	4 jenis	6 jenis	4 jenis	-	4 jenis	5 jenis	4 jenis	-	-	
13	Terpenuhinya jumlah peralatan rumah tangga yang dapat disediakan (paket)	-	-	1 paket	1 paket	25 jenis	-	1 paket	1 paket	24 jenis	-	-	
14	Terpenuhinya jumlah buku dan bacaan yang dapat disediakan (bulan)	-	-	12 bulan, 10 buku	12 bulan, 5 buku	5 jenis	5 jenis	12 bulan, 10 buku	12 bulan, 4 buku	5 jenis	5 jenis	2 dokumen	
15	Terlaksananya jumlah makanan dan minuman yang dapat disediakan (jenis)	-	-	10 bulan	12 bulan (4 jenis)	-	-	10 bulan	12 bulan (4 jenis)	-	-	-	
16	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dapat dihadiri (kali)	-	-	144 keg, 5 tujuan	160 keg., 5 tujuan	150 kali	40 keg	144 keg, 5 tujuan	158 keg., 5 tujuan	142 kali	40 keg	40 laporan	
17	Tersedianya sarana mobilitas operasional kegiatan pada BKD			2 unit	2 unit	-	-	2 unit	2 unit	-	-	-	



NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
				(thn n-3)	(tnn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn-1 n)	(thn n)	(thn n+1)		
1	2	3	4	7	8	8	8	9	10	11		12	13	
18	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	-	-	2 jenis	2 jenis	-	-	2 jenis	-	-	-	-	-	
19	Terpenuhinya jumlah mebelair yang tersedia	-	-	2 jenis	2 jenis	-	-	2 jenis	2 jenis	-	-	-	-	
20	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang dapat terpenuhi	-	-	4 jenis	5 jenis	-	-	4 jenis	5 jenis	-	-	-	-	
21	Jumlah alat-alat elektronik yang tersedia	-	-	-	26 unit, 3 jenis	-	-	-	26 unit, 3 jenis	-	-	-	-	
22	Jumlah lemari besi dan felling cabinet yang tersedia	-	-	5 unit	10 unit	-	-	5 unit	8 unit	-	-	-	-	
23	Terlaksananya perbaikan gedung kantor (unit)	-	-	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	2 unit	
24	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara selama 1 tahun	-	-	30 unit	38 unit	30 kali	40 unit	30 unit	32 unit	30 kali	40 unit	40 unit	40 unit	

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
				(thn n-3)	(tnn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn-1 n)	(thn n)	(thn n+1)		
1	2	3	4	7	8	8	8	9	10	11		12	13	
25	Terlaksananya perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	-	-	10 bulan, 60 ok	12 bulan, 50 ok	-	-	10 bulan, 60 ok	12 bulan, 50 ok	-	-	-	-	
26	Terlaksananya pemeliharaan rutin mebelair (bulan)	-	-	10 bulan, 15 ok	12 bulan, 15 ok	20 kali	-	10 bulan, 15 ok	7 bulan, 9 ok	15 kali	-	-	-	
27	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang membutuhkan pemeliharaan	-	-	10 bulan	12 bulan	-	-	10 bulan	12 bulan	-	-	-	-	
28	Terselesaikannya jumlah SPT PNS (SK)	-	-	400 SK	300 SK	-	-	400 SK	271 SK	-	-	-	-	
29	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	-	65 peserta	1 kegiatan	72 orang	70 orang	65 peserta	1 kegiatan	72 orang	70 orang	70 orang		
30	Terlaksananya pelatihan teknis/bintek/workshop pelaksanaan tupoksi SKPD	-	-	2 kegiatan	1 kegiatan, 75 orang	-	-	2 kegiatan	-	-	-	-	-	

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				(thn n-3)	(tnn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn-1 n)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	7	8	8	8	9	10	11		12	13
31	Terselesaikannya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (buku)	-	-	10 buku	10 buku	10 dokumen	-	10 buku	10 buku	10 buku	-	-	
32	Terselesaikannya penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran (buku)	-	-	10 buku	10 buku	-	-	10 buku	10 buku	-	-	-	
33	Terselesaikannya penyusunan laporan keuangan akhir tahun (buku)	-	-	10 buku	10 buku	-	-	10 buku	10 buku	-	-	-	
34	Terlaksananya monev dan laporan perkembangan kegiatan SKPD (bulan)	-	-	12 bulan	12 bulan	-	-	12 bulan	9 bulan	-	-	-	
35	Terselesaikannya penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran (buku)	-	-	50 buku, 6 dokumen	70 buku, 6 dokumen	5 dokumen	4 dokumen	50 buku, 6 dokumen	65 buku, 6 dokumen	3 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	
36	Terkirimnya CPNS guna mengikuti prajabatan sebagai syarat pengangkatan PNS (orang)	-	-	247 orang	80 orang	-	-	247 orang	73 orang	-	-	-	

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
				(thn n-3)	(tnn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn-1 n)	(thn n)	(thn n+1)		
1	2	3	4	7	8	8	8	9	10	11		12	13	
37	Terkirimnya pejabat struktural mengikuti diklatpim II, III, IV sesuai jenjang jabatannya (orang)	-	-	21 orang	9 orang	-	-	21 orang	-	-	-	-	-	
38	Terkirimnya PNS guna mengikuti diklat teknis sesuai kompetensinya (orang)	-	-	25 orang	32 orang	-	-	25 orang	28 orang	-	-	-	-	
39	Terlaksananya pengiriman diklat fungsional bagi PNS daerah Kabupaten Pematang Jaya (orang)	-	-	15 orang	32 orang	-	-	15 orang	26 orang	-	-	-	-	
40	Tercapainya penetapan untuk mengikuti tugas belajar dan surat ijin belajar, surat keterangan belajar, surat keterangan penggunaan gelar bagi PNS daerah (orang)	-	-	8 orang	5 orang	-	-	8 orang	5 orang	-	-	-	-	
41	Terselenggaranya diklat teknis dan kepemimpinan guna peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalisme PNS.(orang)	-	-	367 orang	240 orang	-	-	367 orang	99 orang	-	-	-	-	

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				(thn n-3)	(tnn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn-1 n)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	7	8	8	8	9	10	11		12	13
42	Terselenggaranya diklat prajabatan bagi CPNS di daerah sebagai syarat pengangkatan menjadi PNS (orang)	-	-	120 orang	120 orang	-	-	120 orang	85 orang	-	-	-	
43	Tercapainya penyelenggaraan diklat fungsional yang menunjang kompetensi, profesional bagi PNS, Ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah PNS	-	-	10 kegiatan	1 keg.	-	-	10 kegiatan	-	-	-	-	
44	Jumlah peserta ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah	-	-	175 orang	100 orang	-	-	175 orang	83 orang	-	-	-	
45	Terselesaikannya pemetaan / master plan penataan pembinaan PNS Kabupaten Pemalang (buah / kegiatan)	-	-	1 kegiatan	1 dokumen	-	-	1 kegiatan	1 dokumen	-	-	-	
46	Terlaksananya hasil tes dan daftar nominatif pengangkatan CPNS dan penetapan NIP (orang)	-	-	6.000 orang	7.600 orang	-	-	6.000 orang	7.285 orang	-	-	-	

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				(thn n-3)	(tnn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn-1 n)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	7	8	8	8	9	10	11		12	13
47	Terselesaikannya jumlah surat keputusan PNS dan SPTKG (SK)	-	-	6.500 SK	6.600 SK	6.000 SK	12 Dokumen, 2 dokumen	6.500 SK	6.600 SK	6.000 SK	12 Dokumen, 2 dokumen	12 Dokumen, 2 dokumen	
48	Terselesaikannya pengelolaan data base dan informasi kepegawaian serta berkas arsip PNS, tenaga honorer dan penyusunan buku profil kepegawaian (orang/PNS)	-	-	15000 file	15000 file	-	-	15000 file	14903 file	-	-	-	
49	Terselenggaranya kegiatan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi dan pengawas	-	-	14 kali	12 kali	-	-	14 kali	4 kali	-	-	-	
50	Terselesaikannya usulan calon pejabat yang dipertimbangkan mengisi kekosongan yang pensiun / dimutasi dan pelaksanaan SOTK, kenaikan pangkat pejabat struktural, pengangkatan kepala sekolah,	-	-	400 orang	400 orang	-	-	400 orang	392 orang	-	-	-	

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
				(thn n-3)	(tnn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn-1 n)	(thn n)	(thn n+1)		
1	2	3	4	7	8	8	8	9	10	11		12	13	
	penyesuaian (inpasing) jabatan fungsional guru. (orang/PNS)													
51	Terlaksananya jumlah kebutuhan alokasi formasi PNS dan pemenuhan jabatan fungsional tertentu	-	-	20 buku	20 buku	-	-	20 buku	17 buku	-	-	-		
52	Terlaksananya jumlah pejabat yang dilantik sebanyak dan pejabat fungsional yang diangkat dan dinaikkan jabatannya	-	-	4 kali	3 kali	-	-	4 kali	2 kali	-	-	-		
53	Terseleenggaranya pembinaan dan fasilitasi jabatan fungsional tertentu	-	-	2 kali	2 kali	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-		
54	Terselesaikannya jumlah SK CPNS menjadi SK PNS dan pelaksanaan sumpah janji PNS	-	-	300 SK	300 SK	-	-	300 SK	283 SK	-	-	-		
55	Terlaksananya jumlah PNS yang SK pensiunnya terselesaikan dan PNS	-	-	409 SK Pensiun	505 SK Pensiun	-	-	409 SK Pensiun	494 SK Pensiun	-	-	-		

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
				(thn n-3)	(tnn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn-1 n)	(thn n)	(thn n+1)		
1	2	3	4	7	8	8	8	9	10	11		12	13	
	purna tugas yang memperoleh tali asih (SK / Orang)													
56	Terlaksananya kegiatan pembinaan terhadap jabatan pelaksana	-	-	2 keg.	-	-	-	2 keg.	-	-	-	-	-	
57	Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan bantuan hukum bagi ASN	-	-	2 keg.	2 keg.	-	-	2 keg.	1 keg	-	-	-	-	
58	Terwujudnya jumlah penghargaan satyalencana yang diberikan kepada PNS yang diusulkan (piagam)	-	-	75 piagam	75 piagam	-	-	75 piagam	68 piagam	-	-	-	-	
59	Terselesaikannya kasus pelanggaran disiplin melalui penerbitan SK Hukuman Disiplin (SK)	-	-	10 PNS	10 PNS, 90 Peserta sosialisasi	-	-	10 PNS	10 PNS, 86 Peserta sosialisasi	-	-	-	-	
60	Terlaksananya pengelolaan penilaian kinerja PNS	-	-	10.500 PNS	10.500 PNS	13 kegiatan	1 dokumen, 2 kegiatan	10.500 PNS	10.500 PNS	13 kegiatan	1 dokumen, 2 kegiatan	1 dokumen, 2 kegiatan	1 dokumen, 2 kegiatan	



NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				(thn n-3)	(tnn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn-1 n)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	7	8	8	8	9	10	11		12	13
61	Terlaksananya penegakan disiplin aparatur melalui pembinaan dan inspeksi pada tiap Satuan Kerja di Pemda Kab. Pematang Jaya (satker)	-	-	50 satker	60 satker, 30 kali, 20 mesin finger	-	-	50 satker	55 satker, 28 kali, 19 mesin finger	-	-	60 orang	
62	Terselesaikannya jumlah surat ijin / surat keterangan untuk melakukan perceraian PNS (surat)	-	-	20 Surat	20 Surat	20 kasus	25 kasus	20 Surat	18 surat	17 kasus	25 kasus	20 kasus	
63	Terselesaikannya Karpeg/KPE, Karis/Karsu, taspen, Konversi NIP, dan LP2P (kartu)	-	-	3.500 kartu	350 karpeg, 356 karis/karsu, 356 taspen	-	-	3.500 kartu	332 karpeg, 338 karis/karsu, 338 taspen	-	-	-	
64	Fasilitasi Organisasi Profesi ASN	-	-	2 keg.	2 keg.	-	-	2 keg.	2 keg	-	-	-	
65	Jumlah pejabat wajib lapor LHKPN yang mengirimkan formulir LHKPN	-	-	42 orang	125 orang	-	-	42 orang	103 orang	-	-	-	

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				(thn n-3)	(tnn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn-1 n)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	7	8	8	8	9	10	11		12	13
66	Jumlah dokumen program dan kegiatan yang tersusun (RKA-SKPD)	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-	-	
67	Jumlah dokumen program dan kegiatan yang tersusun (RKA-SKPD Perubahan)	-	-	-	-	3 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-	-	
68	Jumlah dokumen program dan kegiatan yang tersusun (DPA-SKPD)	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-	-	
69	Jumlah dokumen program dan kegiatan yang tersusun (DPA-SKPD Perubahan)	-	-	-	-	3 Dokumen	-	-	-	3 Dokumen	-	-	
70	Jumlah kinerja perangkat daerah yang di evaluasi	-	-	-	-	6 kali	-	-	-	6 kali	-	-	
71	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	-	-	-	-	1 Tahun	12 bulan	-	-	1 Tahun	12 bulan	12 bulan	
72	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun	-	-	-	-	10 dokumen	-	-	-	-	-	-	

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
				(thn n-3)	(tnn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn-1 n)	(thn n)	(thn n+1)		
1	2	3	4	7	8	8	8	9	10	11		12	13	
73	Jumlah seluruh aset yang disusun tiap tahun	-	-	-	-	350 buah	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Jumlah koordinasi sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan	-	-	-	-	6 kali	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Jumlah ASN yang di pindah tugaskan	-	-	-	-	4 orang	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Jenis bahan logistik kantor yang dibeli	-	-	-	-	80 jenis	35 jenis	-	-	70 jenis	35 jenis	35 paket		
77	Jumlah bahan material yang dibeli	-	-	-	-	60 buah	-	-	-	60 buah	-	-		
78	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	-	-	-	-	15 kali	100 orang	-	-	13 kali	90 orang	4 laporan		
79	Jumlah dan jenis arsip dinamis yang ditata	-	-	-	-	4 jenis	-	-	-	2 jenis	-	-		
80	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dibeli	-	-	-	-	3 jenis	4 paket	-	-	3 jenis	4 paket	24 unit		
81	Jumlah buku yang di beli	-	-	-	-	5 buah	-	-	-	4 buah	-	-		

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				(thn n-3)	(tnn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn-1 n)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	7	8	8	8	9	10	11		12	13
82	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpenuhi	-	-	-	-	2 unit	-	-	-	1 unit	-	-	
83	Jasa-jasa pelayanan umum yang dibayarkan	-	-	-	-	20 ok	20 ok	-	-	20 ok	9 ok	12 laporan	
84	Jasa dan jumlah pemeliharaan serta perizinan alat besar	-	-	-	-	20 kali	20 unit	-	-	11 kali	20 unit	1 unit	
85	Jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	-	-	-	-	15 unit	15 unit	-	-	14 unit	15 unit	15 unit	
86	Jenis aset tak berwujud yang dipelihara	-	-	-	-	1 unit	-	-	-	-	-	-	
87	Jumlah dokumen kebijakan pengadaan ASN	-	-	-	-	1 dok	-	-	-	-	-	-	
88	Jumlah dokumen ABK, formasi ASN dan usulan kebutuhan formasi	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen, 1 dokumen	

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				(thn n-3)	(tnn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn-1 n)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	7	8	8	8	9	10	11		12	13
89	Jumlah fasilitas pengadaan PNS dan PPPK	-	-	-	-	2 Kegiatan	2 kegiatan	-	-	2 Kegiatan	2 kegiatan	2 dokumen, 1 kegiatan	
90	Jumlah pengadaan dan dokumen evaluasi pengadaan	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	
91	Jumlah dokumen kebijakan pemberhentian	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	-	
92	Jumlah dokumen administrasi pemberhentian	-	-	-	-	400 SK	425 SK	-	-	366 SK	425 SK	610 SK	
93	Jumlah kegiatan evaluasi	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	
94	Pengelolaan sistem informasi yang dikelola	-	-	-	-	1 Modul, 30 Mbps, 4000 record, 5000 record.	1 Modul, 30 Mbps, 4000 record, 5000 record.	-	-	1 Modul, 30 Mbps, 3650 record, 4562 record.	1 Modul, 30 Mbps, 6.136 record, 6.260 record.	12 bulan, 1 modul, 12 bulan	

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				(thn n-3)	(tnn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn-1 n)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	7	8	8	8	9	10	11		12	13
95	Jumlah dokumen elektronik, jumlah id card dan kartu pegawai, jumlah kegiatan perhitungan TPP, jumlah tata naskah kepegawaian.	-	-	-	-	5000 Dokumen, 400 buah, 9 kegiatan, 5000 lbr	5000 Dokumen, 400 buah, 9 kegiatan, 5000 lbr	-	-	4404 Dokumen, 352 buah, 9 kegiatan, 4404 lbr	3.960 Dokumen, 0 buah, 9 kegiatan, 5.932 lbr	6.000 dokumen, 10.000 dokumen, 12 kegiatan, 6.000 lembar	
96	Jumlah buku ASN yang disusun dalam angka, jumlah evaluasi data informasi dan sistem informasi kepegawaian.	-	-	-	-	75 buah, 1 kegiatan	75 buah, 1 kegiatan	-	-	70 buah, 1 kegiatan	75 buah, 1 kegiatan	100 buah, 1 kegiatan	
97	Jumlah PNS yang dimutasi	-	-	-	-	500 PNS	520 PNS	-	-	352 PNS	476 PNS	520 PNS, 5 dokumen	
98	Jumlah PNS yang promosi	-	-	-	-	150 PNS	140 PNS	-	-	70 PNS	140 PNS	140 PNS, 4 dokumen	

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				(thn n-3)	(tnn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn-1 n)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	7	8	8	8	9	10	11		12	13
99	Peningkatan kapasitas kinerja ASN	-	-	-	-	1 Dok, 200 PNS	3 Dok, 200 PNS	-	-	1 Dok, 186 PNS	3 Dok, 173 PNS	235 dokumen	
100	Jumlah PNS yang mengikuti assessment	-	-	-	-	400 PNS	500 PNS	-	-	-	350 PNS	500 PNS, 1 dokumen	
101	Jumlah dokumen kegiatan pelatihan dan sertifikasi ASN	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	
102	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan lanjutan ijin belajar, jumlah PNS yang mengikuti pendidikan lanjutan tugas belajar	-	-	-	-	150 PNS, 3 PNS	150 PNS, 4 PNS	-	-	145 PNS, 3 PNS	122 PNS, 3 PNS	3 orang	
103	Jumlah dokumen kerjasama, jumlah PNS yang mengikuti pelatihan	-	-	-	-	3 Dok, 342 CPNS	1 Dok, 353 CPNS	-	-	3 Dok, 335 CPNS	1 Dok, 353 CPNS	1.735 orang	
104	Jumlah kegiatan fasilitasi sertifikasi jabatan ASN	-	-	-	-	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	





NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
				(thn n-3)	(tnn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn-1 n)	(thn n)	(thn n+1)		
1	2	3	4	7	8	8	8	9	10	11		12	13	
112	Jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional	-	-	-	-	2 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	
113	Jumlah dokumen pengembangan jabatan fungsional	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-	
114	Jumlah dokumen kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-	
115	Jumlah dokumen evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-	
116	Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan, jumlah PNS yang mendapatkan pelayanan kesehatan	-	-	-	-	3 orang, 1.000 PNS	4 orang, 600 PNS	-	-	3 orang, 910 PNS	4 orang, 985 PNS	1.000 PNS, 6 PNS, 2.800 PNS, 400 PNS		
117	Jumlah tanda jasa yang di usulkan	-	-	-	-	50 usulan	100 usulan	-	-	45 usulan	100 usulan	150 PNS		

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
				(thn n-3)	(tnn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn-1 n)	(thn n)	(thn n+1)		
1	2	3	4	7	8	8	8	9	10	11		12	13	
118	Jumlah dokumen evaluasi pemberian penghargaan dan tanda jasa	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-	
119	Jumlah kegiatan pembinaan disiplin	-	-	-	-	5 Uji kesehatan khusus, 30 keg, 100 dok cuti, 500 LHKPN.	7 Uji kesehata n khusus, 60 keg, 150 dok cuti, 500 LHKPN.	-	-	5 Uji kesehata n khusus, 30 keg, 95 dok cuti, 474 LHKPN.	7 Uji kesehat an khusus, 34 keg, 195 dok cuti, 400 LHKPN.	5 Uji kesehata n khusus, 1 kegiatan, 36 kegiatan		
120	Jumlah penyelesaian pelanggaran disiplin	-	-	-	-	12 kasus	20 kasus	-	-	9 kasus	13 Kasus	20 kasus		
121	Jumlah dokumen evaluasi disiplin ASN	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	-	-		

Berdasarkan tabel di atas, Badan Kepegawaian Daerah pada tahun 2022 termasuk sangat baik, mengingat banyak capaian realisasi kinerja mencapai 100%.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaga Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tuga, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang merupakan :

1. Unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang dipimpin oleh kepala badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
3. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota. Adapun susunan organisasi Badan Kepegawaian Dearah Kabupaten Pemalang terdiri dari :
  - a. Kepala Badan Kepegawaian Daearah
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Bina Program dan Keuangan;
    - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Jabatan dan Penilaian Kinerja, terdiri dari :
    - 1) Subkor Jabatan;
    - 2) Subkor Penilaian Kinerja dan Kepangkatan;
    - 3) Subkor Data dan Informasi;
  - d. Bidang Mutasi dan Pembinaan, terdiri dari :
    - 1) Subkor Formasi dan Pemindehan;
    - 2) Subkor Pembinaan dan Pemberhentian;
    - 3) Subkor Status dan Penghargaan.
  - e. Bidang Pengembangan Aparatur, terdiri dari :
    - 1) Subkor Pengembangan Kompetensi;
    - 2) Subkor Pendidikan dan Pelatihan.

### 2.3 **Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten**

Isu dan masalah strategis yang menjadi perhatian utama pada tahun rencana 2022 merupakan hasil dari evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan tugas pokok fungsi Badan Kepegawaian Daerah serta permasalahan yang timbul pada tahun-tahun sebelumnya.

Adanya PNS yang ada tidak berkualifikasi sesuai dengan kebutuhan tugas fungsi jabatan yang diduduki, PNS yang ada tidak terdaya gunakan secara optimal, dan kinerjanya rendah. Hal itu merupakan perwujudan yang nampak sebagai berikut :

1. Pembinaan dan pengembangan karir jabatan PNS belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan, dan Pola Karier PNS yang jelas;
2. Belum terbangunnya Sistem Perencanaan dalam Rekrutmen PNS berdasarkan kebutuhan formasi jabatan dan standar kompetensinya, mengakibatkan distribusi dan alokasi pegawai belum merata;
3. Berbagai regulasi dan kebijakan pembinaan PNS (peraturan perundang-undangan kepegawaian) sebagian besar belum terlaksana dan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pembinaan lokal;
4. Dalam rangka perumusan kebijakan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian belum sepenuhnya didukung data dan informasi (database) kepegawaian yang memadai;
5. Kondisi kepegawaian yang ada masih diwarnai ketidak konsistennya penyelenggaraan manajemen PNS terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, diberbagai instansi pemerintah.

Isu-isu tersebut yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, berkenaan dengan peran BKD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan dibidang kepegawaian, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum terbangunnya sistem perencanaan SDM yang terintegrasi
2. Masih rendahnya penerapan sistem reward dan punishment
3. Belum optimalnya peningkatan kapasitas, kompetensi yang mengarah pada peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur;
4. Belum tersusunnya database kompetensi pegawai.
5. Masih rendahnya disiplin PNS;
6. Belum optimalnya pemanfaatan dan penerapan teknologi informatika dalam aplikasi system informasi manajemen kepegawaian dalam pelayanan administrasi maupun informasi.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Penyusunan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2022 mengacu pada program dan kegiatan tahun 2021 dan RKPD tahun 2022. Review Rancangan awal RKPD tahun 2022 terhadap Hasil Analisa Kebutuhan tahun 2022, dapat dilihat pada di bawah ini:

**Tabel 2.3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023**  
**Kabupaten Pemalang**

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemalang	Prosentase terwujudnya program penunjang urusan pemerintah daerah	100	9.608.941.325	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemalang	Prosentase terwujudnya program penunjang urusan pemerintah daerah	87,15	8.374.097.435	
	5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemalang	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (persen)	100	20.500.000	5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemalang	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (persen)	100	13.580.750	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pemalang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (dok)	4	12.500.000	5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pemalang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (dok)	4 dok	4.741.750	
	5.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pemalang	Jumlah dokumen program dan kegiatan yang tersusun (dok)	1	1.000.000	5.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pemalang	Jumlah dokumen program dan kegiatan yang tersusun (dok)	1 dok	885.000	
	5.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pemalang	Jumlah dokumen perubahan program dan kegiatan tersusun (dok)	3	1.000.000	5.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pemalang	Jumlah dokumen perubahan program dan kegiatan tersusun (dok)	3 dok	735.000	
	5.03.01.2.01.04 Koordinasi dan	Pemalang	Jumlah dokumen program dan kegiatan yang tersusun (dok)	1	1.000.000	5.03.01.2.01.04 Koordinasi dan	Pemalang	Jumlah dokumen program dan	1 dok	1.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan DPA-SKPD					Penyusunan DPA-SKPD		kegiatan yang tersusun (dok)			
	5.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pemalang	Jumlah dokumen perubahan program dan kegiatan tersusun (dok)	3	1.000.000	5.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pemalang	Jumlah dokumen perubahan program dan kegiatan tersusun (dok)	3 dok	1.000.000	
	5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemalang	Jumlah laporan capaian kinerja dan kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun (dok)	10	1.000.000	5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemalang	Jumlah laporan capaian kinerja dan kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun (dok)	10 dok	1.903.000	
	5.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemalang	Jumlah kinerja perangkat daerah yang dievaluasi (kali)	6	3.000.000	5.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemalang	Jumlah kinerja perangkat daerah yang dievaluasi (kali)	6 kali	3.316.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Pemalang	<b>Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>7.670.571.000</b>	<b>5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Pemalang	<b>Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>6.575.339.336</b>	
	5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemalang	Jumlah gaji dan tunjangan ASN (tahun)	1	7.647.571.000	5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemalang	Jumlah gaji dan tunjangan ASN (tahun)	1 tahun	6.575.339.336	
	5.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemalang	Jumlah surat perintah pelaksanaan tugas ASN	11	5.000.000	5.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemalang	Jumlah surat perintah pelaksanaan tugas ASN	18 dok	0	
	5.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika	Pemalang	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	12	5.000.000	5.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik	Pemalang	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	1 dok	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	si Keuangan SKPD					asi Keuangan SKPD					
	<b>5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Pemalang</b>	<b>Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Pemalang</b>	<b>Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (Persen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	5.03.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pemalang	Jumlah seluruh aset yang disusun tiap tahun (buah)	350	5.500.000	5.03.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pemalang	Jumlah seluruh aset yang disusun tiap tahun (buah)	350 buah	0	
	<b>5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Pemalang</b>	<b>Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah (persen)</b>	<b>100</b>	<b>178.500.000</b>	<b>5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Pemalang</b>	<b>Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah (persen)</b>	<b>100</b>	<b>48.765.200</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.03.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pemalang	Jumlah koordinasi sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan (kali)	6	2.500.000	5.03.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pemalang	Jumlah koordinasi sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan (kali)	6 kali	0	
	5.03.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pemalang	Jumlah pengendalian kegiatan dan fasilitasi kegiatan (bulan)	12	13.000.000	5.03.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pemalang	Jumlah pengendalian kegiatan dan fasilitasi kegiatan (bulan)	12 bulan	0	
	5.03.01.2.05.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Pemalang	Jumlah pegawai yang pensiun (orang)	3	8.000.000	5.03.01.2.05.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Pemalang	Jumlah pegawai pensiun (orang)	3 orang	0	
	5.03.01.2.05.08 Pemandahan Tugas ASN	Pemalang	Jumlah ASN yang dipindah tugaskan (orang)	4	5.000.000	5.03.01.2.05.08 Pemandahan Tugas ASN	Pemalang	Jumlah ASN yang dipindah tugaskan (orang)	4 orang	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.03.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemalang	Jumlah Penyelenggaraan dan jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)	70	75.000.000	5.03.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemalang	Jumlah Penyelenggaraan dan jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)	70 orang	0	
	5.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemalang	Jumlah Penyelenggaraan dan jumlah peserta yang mengikuti Bintek peraturan perundang-undangan (orang)	70	75.000.000	5.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemalang	Jumlah Penyelenggaraan dan jumlah peserta yang mengikuti Bintek peraturan perundang-undangan (orang)	70 orang	48.765.200	
	<b>5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Pemalang</b>	<b>Persentase administrasi umum perangkat daerah (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>763.548.775</b>	<b>5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Pemalang</b>	<b>Persentase administrasi umum perangkat daerah (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>762.137.506</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemalang	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli (jenis, unit)	12	64.354.775	5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemalang	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli (jenis, unit)	12 jenis	46.826.000	
	5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemalang	Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli (jenis)	4	50.000.000	5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemalang	Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli (jenis)	4 jenis	43.450.000	
	5.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemalang	Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli (jenis)	25	40.000.000	5.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemalang	Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli (jenis)	25 jenis	42.773.500	
	5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemalang	Jenis bahan logistik kantor yang dibeli (jenis)	80	140.000.000	5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemalang	Jenis bahan logistik kantor yang dibeli (jenis)	80 jenis	87.788.700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemalang	Jenis barang yang dicetak dan digandakan (paket)	5	30.000.000	5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemalang	Jenis barang yang dicetak dan digandakan (paket)	5 paket	40.455.000	
	5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pemalang	Jenis dan jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang dibeli (jenis)	5	20.000.000	5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pemalang	Jenis dan jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang dibeli (jenis)	5 jenis	27.725.000	
	5.03.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Pemalang	Jumlah bahan material yang dibeli (buah)	60	140.020.000	5.03.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Pemalang	Jumlah bahan material yang dibeli (buah)	60 buah	33.049.000	
	5.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pemalang	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi (kali)	15	7.500.000	5.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pemalang	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi (kali)	15 kali	12.869.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemalang	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diikuti (kali)	150	246.674.000	5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemalang	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diikuti (kali)	150 kali	407.841.306	
	5.03.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pemalang	Jumlah dan jenis arsip dinamis yang ditata (jenis)	4	25.000.000	5.03.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pemalang	Jumlah dan jenis arsip dinamis yang ditata (jenis)	4 jenis	18.960.000	
	<b>5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Pemalang	<b>Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>441.746.550</b>	<b>5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Pemalang	<b>Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>262.932.100</b>	
	5.03.01.2.07.01 Pengadaan	Pemalang	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	2	60.000.000	5.03.01.2.07.01 Pengadaan	Pemalang	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	2 unit	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		dalam satu tahun (unit)			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		dalam satu tahun (unit)			
	5.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Pemalang	Jumlah dan jenis mebel yang dibeli (jenis)	2	50.000.000	5.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Pemalang	Jumlah dan jenis mebel yang dibeli (jenis)	2 jenis	0	
	5.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemalang	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dibeli (jenis)	3	219.192.800	5.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemalang	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dibeli (jenis)	3 jenis	228.256.600	
	5.03.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pemalang	Jumlah buku yang dibeli (buah)	5	7.500.000	5.03.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pemalang	Jumlah buku yang dibeli (buah)	5 buah	19.065.000	
	5.03.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Pemalang	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpenuhi (unit)	2	105.053.750	5.03.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Pemalang	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpenuhi (unit)	2 unit	15.610.500	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	atau Bangunan Lainnya					atau Bangunan Lainnya					
	<b>5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemalang</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>428.375.000</b>	<b>5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemalang</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>401.844.942</b>	
	5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemalang	Jumlah surat masuk, surat keluar, materai dan pengiriman dokumen (surat)	4	26.000.000	5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemalang	Jumlah surat masuk, surat keluar, materai dan pengiriman dokumen (surat)	4 jenis	2.754.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemalang	Rekening jasa sumberdaya yang dibayar tiap bulan (rekening)	3	185.000.000	5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemalang	Rekening jasa sumberdaya yang dibayar tiap bulan (rekening)	3 rekening	176.923.492	
	5.03.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemalang	Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayarkan (unit)	150	79.875.000	5.03.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemalang	Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayarkan (unit)	150 unit	77.167.450	
	5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemalang	Jasa-jasa pelayanan umum yang dibayarkan (ok)	20	137.500.000	5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemalang	Jasa-jasa pelayanan umum yang dibayarkan (ok)	20 ok	145.000.000	
	<b>5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Pemalang</b>	<b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan</b>	<b>100</b>	<b>255.200.000</b>	<b>5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Pemalang</b>	<b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang</b>	<b>100</b>	<b>309.497.601</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>pemerintah daerah (Persen)</b>			<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>urusan pemerintah daerah (Persen)</b>			
	5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemalang	Jasa dan jumlah pemeliharaan serta perizinan kendaraan dinas jabatan (kali)	80	74.600.000	5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemalang	Jasa dan jumlah pemeliharaan serta perizinan kendaraan dinas jabatan (kali)	80 kali	53.317.500	
	5.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Pemalang	Jasa dan jumlah pemeliharaan serta perizinan kendaraan dinas operasional (kali)	30	35.000.000	5.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Pemalang	Jasa dan jumlah pemeliharaan serta perizinan kendaraan dinas operasional (kali)	30 kali	55.052.101	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
	5.03.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Pemalang	Jasa dan jumlah pemeliharaan serta perizinan alat besar operasional (kali)	20	60.000.000	5.03.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Pemalang	Jasa dan jumlah pemeliharaan serta perizinan alat besar operasional (kali)	20 kali	38.543.000	
	5.03.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Pemalang	Jumlah dan jenis mebel yang dipelihara (kali)	20	10.000.000	5.03.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Pemalang	Jumlah dan jenis mebel yang dipelihara (kali)	20 kali	7.160.000	
	5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemalang	Jenis peralatan dan mesinnya yang dipelihara (unit)	15	20.000.000	5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemalang	Jenis peralatan dan mesinnya yang dipelihara (unit)	15 unit	31.060.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.03.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pemalang	jasa aset tak berwujud yang dipelihara (unit)	1	20.000.000	5.03.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pemalang	jasa aset tak berwujud yang dipelihara (unit)	1 unit	0	
	5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemalang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	3	35.600.000	5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/R rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemalang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	3 unit	124.365.000	
	<b>5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Pemalang	<b>Persentase mutasi, rotasi, promosi dan pengembangan ASN (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>8.038.629.675</b>	<b>5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Pemalang	<b>Persentase mutasi, rotasi, promosi dan pengembangan ASN (Persen)</b>	<b>40,03</b>	<b>3.217.953.538</b>	
	<b>5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi</b>	Pemalang	<b>Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi</b>	<b>100</b>	<b>1.545.280.000</b>	<b>5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi</b>	Pemalang	<b>Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi</b>	<b>100</b>	<b>1.102.064.862</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Kepegawaian ASN</b>		<b>Kepegawaian ASN (Persen)</b>			<b>Kepegawaian ASN</b>		<b>Kepegawaian ASN (Persen)</b>			
	5.03.02.2.01.01 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Pemalang	Jumlah dokumen kebijakan pengadaan ASN (dok)	1	5.000.000	5.03.02.2.01.01 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Pemalang	Jumlah dokumen kebijakan pengadaan ASN (dok)	1 dok	0	
	5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Pemalang	Jumlah dokumen ABK, formasi ASN dan usulan kebutuhan formasi (dok)	1	61.550.000	5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Pemalang	Jumlah dokumen ABK, formasi ASN dan usulan kebutuhan formasi (dok)	1 dok	47.657.100	
	5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Pemalang	Jumlah fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Keg)	2	1.000.000.000	5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Pemalang	Jumlah fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Keg)	2 keg	597.296.416	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.03.02.2.01.04 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Pemalang	Jumlah pengadaan dan dokumen evaluasi pengadaan (dok)	1	5.000.000	5.03.02.2.01.04 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Pemalang	Jumlah pengadaan dan dokumen evaluasi pengadaan (dok)	1 dok	0	
	5.03.02.2.01.05 Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Pemalang	Jumlah dokumen kebijakan pemberhentian (dok)	2	10.000.000	5.03.02.2.01.05 Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Pemalang	Jumlah dokumen kebijakan pemberhentian (dok)	2 dok	0	
	5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Pemalang	Jumlah dokumen administrasi pemberhentian (sk)	400	87.880.000	5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Pemalang	Jumlah dokumen administrasi pemberhentian (sk)	400 sk	85.808.675	
	5.03.02.2.01.07 Evaluasi Pemberhentian ASN	Pemalang	Jumlah kegiatan evaluasi (dok)	1	5.000.000	5.03.02.2.01.07 Evaluasi Pemberhentian ASN	Pemalang	Jumlah kegiatan evaluasi (dok)	1 dok	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.03.02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		Jumlah fasilitasi lembaga profesi (dok)	2	10.850.000	5.03.02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		Jumlah fasilitasi lembaga profesi (dok)	2 dok	0	
	5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pemalang	Jumlah sistem informasi yang dikelola (Modul, MBps, Record, Record)	1, 30, 4000, 5000	171.000.000	5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pemalang	Jumlah sistem informasi yang dikelola (Modul, MBps, Record, Record)	1 modul, 30 MBps, 4.000 record	137.178.635	
	5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian	Pemalang	Jumlah dokumen elektronik, Jumlah ID card dan kartu pegawai, Jumlah kegiatan perhitungan TPP, Jumlah tata naskah kepegawaian (dok, buah, keg, lembar)	5000, 400, 9, 5000	133.000.000	5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian	Pemalang	Jumlah dokumen elektronik, Jumlah ID card dan kartu pegawai, Jumlah kegiatan perhitungan TPP, Jumlah tata naskah kepegawaian (dok, buah, keg, lembar)	5000 dok, 400 buah, 9 keg, 5000 lbr	193.007.536	
	5.03.02.2.01.12 Evaluasi Data, Informasi dan	Pemalang	Jumlah buku ASN yang disusun dalam angka, Jumlah	75,1	56.000.000	5.03.02.2.01.12 Evaluasi Data, Informasi dan	Pemalang	Jumlah buku ASN yang disusun dalam angka, Jumlah	75 buah, 1 keg	41.116.500	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sistem Informasi Kepegawaian		evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian (buah, keg)			Sistem Informasi Kepegawaian		evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian (buah, keg)			
	<b>5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN</b>	Pemalang	<b>Persentase Mutasi dan Promosi ASN (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>1.030.000.000</b>	<b>5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN</b>	Pemalang	<b>Persentase Mutasi dan Promosi ASN (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>894.521.037</b>	
	5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Pemalang	Jumlah PNS yang dimutasi (PNS)	520	350.000.000	5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Pemalang	Jumlah PNS yang dimutasi (PNS)	520 pns	333.247.677	
	5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pemalang	Jumlah keputusan kenaikan pangkat dan SPTKG yang terselesaikan (KP, SPTKG)	1200, 4800	80.000.000	5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pemalang	Jumlah keputusan kenaikan pangkat dan SPTKG yang terselesaikan (KP, SPTKG)	1.200 kp 4.800 sptkg	77.281.900	
	5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN	Pemalang	Jumlah PNS yang promosi (PNS)	140	600.000.000	5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN	Pemalang	Jumlah PNS yang promosi (PNS)	140 PNS	483.991.460	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN</b>	Pemalang	<b>Persentase Pengembangan Kompetensi ASN (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>5.068.846.500</b>	<b>5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN</b>	Pemalang	<b>Persentase Pengembangan Kompetensi ASN (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>2.711.682.000</b>	
	5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Pemalang	Jumlah dokumen AKPK, Jumlah PNS yang mengikuti UKPPI dan Ujian Dinas (dok, PNS)	2, 100	51.244.000	5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Pemalang	Jumlah dokumen AKPK, Jumlah PNS yang mengikuti UKPPI dan Ujian Dinas (dok, PNS)	2 dok, 200 pns	52.295.500	
	5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center	Pemalang	Jumlah PNS yang mengikuti Assessment (PNS)	500	146.085.000	5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center	Pemalang	Jumlah PNS yang mengikuti Assessment (PNS)	500 pns	8.998.571	
	5.03.02.2.03.03 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Pemalang	Jumlah dokumen kegiatan pelatihan dan sertifikasi ASN (dok)	1	6.000.000	5.03.02.2.03.03 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Pemalang	Jumlah dokumen kegiatan pelatihan dan sertifikasi ASN (dok)	1 dok	0	
	5.03.02.2.03.04 Pengelolaan	Pemalang	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan	150, 4	500.000.000	5.03.02.2.03.04 Pengelolaan	Pemalang	Jumlah ASN yang mengikuti	4 pns 150 pns	264.448.358	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendidikan Lanjutan ASN		lanjutan ijin belajar, tugas belajar (PNS, PNS)			Pendidikan Lanjutan ASN		pendidikan lanjutan ijin belajar, tugas belajar (PNS, PNS)			
	5.03.02.2.03.05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Pemalang	Jumlah dokumen kerjasama, Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan (dok, CPNS)	3, 342	4.087.000.000	5.03.02.2.03.05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Pemalang	Jumlah dokumen kerjasama, Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan (dok, CPNS)	3 dok 342 cpns	691.965.737	
	5.03.02.2.03.06 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Pemalang	Jumlah kegiatan fasilitasi sertifikasi jabatan ASN (keg)	1	25.000.000	5.03.02.2.03.06 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Pemalang	Jumlah kegiatan fasilitasi sertifikasi jabatan ASN (keg)	1 keg	0	
	5.03.02.2.03.07 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Pemalang	Jumlah dokumen evaluasi pelatihan dan sertifikasi jabatan ASN (dok)	1	5.000.000	5.03.02.2.03.07 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Pemalang	Jumlah dokumen evaluasi pelatihan dan sertifikasi jabatan ASN (dok)	1 dok	0	
	5.03.02.2.03.08 Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi		Jumlah dokumen penyusunan administrasi pelatihan	1	5.000.000	5.03.02.2.03.08 Penyusunan Administrasi Diklat dan		Jumlah dokumen penyusunan administrasi pelatihan dan	1 dok	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jabatan Fungsional		dan sertifikasi jabatan fungsional (dok)			Sertifikasi Jabatan Fungsional		sertifikasi jabatan fungsional (dok)			
	5.03.02.2.03.09 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional		Jumlah dokumen kerjasama dan jumlah PNS yang mengikuti pelatihan jabatan fungsional (PNS)	2, 80	20.000.000	5.03.02.2.03.09 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional		Jumlah dokumen kerjasama dan jumlah PNS yang mengikuti pelatihan jabatan fungsional (PNS)	2 dok, 80 pns	0	
	5.03.02.2.03.10 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN		Jumlah PNS yang difasilitasi sertifikasi jabatan fungsional (PNS)	15	100.000.000	5.03.02.2.03.10 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN		Jumlah PNS yang difasilitasi sertifikasi jabatan fungsional (PNS)	15 pns	0	
	5.03.02.2.03.11 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional		Jumlah dokumen evaluasi pelatihan dan sertifikasi jabatan fungsional (dok)	1	10.000.000	5.03.02.2.03.11 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional		Jumlah dokumen evaluasi pelatihan dan sertifikasi jabatan fungsional (dok)	1 dok	0	
	5.03.02.2.03.12 Sosialisasi dan		Jumlah kegiatan sosialiasi dan	4	25.000.000	5.03.02.2.03.12 Sosialisasi dan		Jumlah kegiatan sosialiasi dan	4 keg	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN		penyebaran informasi jabatan fungsional ASN (keg)			Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN		penyebaran informasi jabatan fungsional ASN (keg)			
	5.03.02.2.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN		Jumlah kegiatan pembinaan fungsional ASN (keg)	5	63.517.500	5.03.02.2.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN		Jumlah kegiatan pembinaan fungsional ASN (keg)	5 keg	0	
	5.03.02.2.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional (keg)	4	20.000.000	5.03.02.2.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional (keg)	4 keg	0	
	5.03.02.2.03.15 Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional		Jumlah dokumen pengembangan jabatan fungsional (dok)	1	5.000.000	5.03.02.2.03.15 Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional		Jumlah dokumen pengembangan jabatan fungsional (dok)	1 dok	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>		<b>Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>394.503.175</b>	<b>5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>		<b>Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>203.659.473</b>	
	5.03.02.2.04.01 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah dokumen kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja (dok)	1	10.000.000	5.03.02.2.04.01 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah dokumen kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja (dok)	1 dok	0	
	5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja (keg)	13	65.850.000	5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja (keg)	13 keg	48.370.000	
	5.03.02.2.04.03 Evaluasi Hasil Penilaian dan		Jumlah dokumen evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja (dok)	1	5.000.000	5.03.02.2.04.03 Evaluasi Hasil Penilaian dan		Jumlah dokumen evaluasi hasil penilaian dan	1 dok	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Evaluasi Kinerja Aparatur					Evaluasi Kinerja Aparatur		evaluasi kinerja (dok)			
	5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Jumlah PNS yang terlayani dan Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan (org, PNS)	4 / 600	75.600.000	5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Jumlah PNS yang terlayani dan Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan (org, PNS)	4 org 600 pns	53.930.465	
	5.03.02.2.04.05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai		Jumlah tanda jasa yang diusulkan (usulan)	100	50.053.175	5.03.02.2.04.05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai		Jumlah tanda jasa yang diusulkan (usulan)	100 usulan	24.326.000	
	5.03.02.2.04.06 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur		Jumlah dokumen evaluasi pemberian penghargaan dan tanda jasa (dok)	1	5.000.000	5.03.02.2.04.06 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur		Jumlah dokumen evaluasi pemberian penghargaan dan tanda jasa (dok)	1 dok	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah kegiatan pembinaan disiplin (uji kesehatan kusus, keg, dok cuti, LHKPN)	7,60,150,500	90.000.000	5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah kegiatan pembinaan disiplin (uji kesehatan kusus, keg, dok cuti, LHKPN)	7 uji kesehatan khusus 60 keg 150 dok 500 LHKPN	37.863.333	
	5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah penyelesaian pelanggaran disiplin (kasus)	20	63.000.000	5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah penyelesaian pelanggaran disiplin (kasus)	20 kasus	26.411.675	
	5.03.02.2.04.09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Jumlah penyelesaian proses izin perceraian (kasus)	25	25.000.000	5.03.02.2.04.09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Jumlah penyelesaian proses izin perceraian (kasus)	25 kasus	12.758.000	
	5.03.02.2.04.10 Evaluasi Disiplin ASN		Jumlah dokumen evaluasi disiplin ASN (dokumen)	3	5.000.000	5.03.02.2.04.10 Evaluasi Disiplin ASN		Jumlah dokumen evaluasi disiplin ASN (dokumen)	3 dok	0	





## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kepegawaian Daerah menghimpun seluruh usulan dan masukan kegiatan dari OPD yang menyangkut peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur baik bersifat teknis, fungsional maupun penjejjangan karier.

Program/kegiatan yang diusulkan tersebut dilakukan kajian baik kesesuaian dengan isu-isu penting dan kebutuhan Pemerintah Daerah maupun tugas pokok yang melekat pada OPD bersangkutan terkait pencapaian target jangka pendek dan menengah pembangunan daerah.

Penelaahan lebih lanjut atas usulan kegiatan dimaksud, dilakukan penyelarasan dengan kebijakan tingkat nasional dan regional provinsi yang menjadi fokus bagi daerah guna memperoleh tingkat prioritas kegiatan yang hendak diusulkan akan dilaksanakan pada rencana kerja tahun bersangkutan.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang belum dapat menelaah usulan program dan kegiatan dari masyarakat secara langsung, mengingat sasaran dari program dan kegiatan BKD adalah Pegawai Negeri Sipil. Namun sebagai OPD *supporting sistem*, program dan kegiatan BKD akan berdampak langsung pada masyarakat. Sebagai contoh untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), diantara indikator utamanya adalah pendidikan dan kesehatan. Melalui program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, BKD melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional baik pengiriman ataupun penyelenggaraan, berupa Diklat Pengadaan Barang/Jasa, Diklat Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Diklat Peningkatan Kompetensi Guru SD dan lain-lain.

**Tabel 2.5**

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU  
KEPENTINGAN/OPD/UNIT KERJA TAHUN 2023  
PADA BKD KABUPATEN PEMALANG**

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		<b>N I H I L</b>			

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pasal 1 angka 1 Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sedangkan pada Pasal 10 UU 5/2014 disebutkan bahwa ASN berfungsi sebagai: (1) pelaksana kebijakan publik; (2) pelayan publik; dan (3) perekat dan pemersatu bangsa. Ketiga fungsi ASN yang sangat penting itu akan berjalan apabila kebijakan, pembinaan, pengawasan, dan manajemennya berjalan dengan baik. Pada Pasal 25 ayat (2) UU 5/2014 disebutkan bahwa Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada 4 (empat) lembaga, yaitu: (i) Kementerian PAN RB, (ii) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), (iii) Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan (iv) Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sasaran strategis BKN dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan berdasarkan potensi dan permasalahan BKN serta kebijakan nasional dalam RPJMN adalah “Meningkatnya Tingkat Profesionalisme Pegawai ASN”. Pencapaian strategis diatas yang bersifat impact (sasaran ultimate), berikut ini sasaran intermediate yang akan dicapai dalam Program BKN yang dapat berfungsi dan memiliki manfaat terhadap capaian sasaran strategis. Sasaran strategis dalam mewujudkan visi dan misi BKN adalah: 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN; 2. Keandalan sistem informasi ASN; 3. Meningkatnya disiplin pegawai; 4. Meningkatnya profesionalisme ASN; 5. Terwujudnya pelayanan kepegawaian dengan berbasis manajemen mutu; 6. Meningkatnya pelayanan pembinaan PNS Terwujudnya BKN yang akuntabel dan tata kelola pemerintahan yang baik

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja B

Tujuan dan sasaran pada Badan Kepegawian Daerah Kabupaten Pematang mendukung misi ke-2 yaitu ”**Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, dan bersih**” dengan tujuan daerah Mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien serta tujuan pada perangkat daerah adalah Meningkatkan Birokrasi Kapabel dan indikator tujuan perangkat daerahnya adalah Indeks Profesional ASN (IPA), serta sasaran perangkat daerah terdiri dari :

1. Meningkatnya profesionalitas ASN
2. Meningkatnya Kompetensi ASN
3. Meningkatnya Kinerja ASN

4. Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan ASN
5. Meningkatnya Disiplin ASN

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Jaya pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Dilaksanakan melalui kegiatan antara lain :

- 1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
  1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  4. Koordinasi dan penyusunan DPA -SKPD
  5. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD
  6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
  4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
  1. Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
  1. Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
  2. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
  3. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
  4. Pemindahan Tugas ASN
  5. Sosialisasi peraturan perundangan-undangan
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  4. Penyediaan bahan logistik kantor
  5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  6. Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  7. Penyediaan bahan/material
  8. Fasilitas Kunjungan Tamu
  9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
1. Pengadaan Mebel
  2. Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya
  3. Pengadaan aset tetap lainnya
  4. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
1. Penyediaan jasa surat menyurat
  2. penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
  3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
  4. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
  2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  3. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar
  4. Pemeliharaan mebel
  5. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
  6. Pemeliharaan aset tak berwujud
  7. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

## **2. Program Kepegawaian Daerah**

- 1) Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
  1. Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN

2. Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN
  3. Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK
  4. Evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN
  5. Perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN
  6. Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian
  7. Evaluasi pemberhentian ASN
  8. Fasilitasi lembaga profesi ASN
  9. Perumusan Bahan kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi
  10. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian
  11. Pengelolaan data kepegawaian
  12. Evaluasi data, informasi dan sistem kepegawaian
- 2) Mutasi dan Promosi ASN, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut:
1. Pengelolaan Mutasi ASN
  2. Pengelolaan kenaikan pangkat ASN
  3. Pengelolaan promosi ASN
- 3) Pengembangan kompetensi ASN, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
1. Peningkatan kapasitas kinerja ASN
  2. Pengelolaan assesment center
  3. Pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN
  4. Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN
  5. Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat
  6. Fasilitasi sertifikasi Jabatan ASN
  7. Evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan
  8. penyusunan administrasi diklat dan sertifikasi jabatan fungsional
  9. Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat jabatan fungsional
  10. Fasilitasi sertifikasi fungsional ASN
  11. Evaluai diklat dan sertifikasi pejabat fungsional
  12. Sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN
  13. Pembinaan jabatan fungsional ASN
  14. Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional
  15. evaluasi pengembangan jabatan fungsional
- 4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
  2. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
  3. Evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur

4. Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai
5. Pengelolaan tanda jasa bagi pegawai
6. Evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur
7. Pembinaan disiplin ASN
8. Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN
9. Pelayanan proses izin perceraian pegawai
10. Evaluasi disiplin ASN

Rumusan rencana program dan kegiatan, indikator, penyebaran lokasi pelaksanaan kegiatan, target, indikatif anggaran serta prakiraan maju untuk tahun selanjutnya sebagaimana dalam table.

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**  
**Tabel 3.1**  
**Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**Kabupaten Pematang Jaya**

**Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah (BKD)**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Urusan								
5.03	Kepegawaian								
5.03.04	Badan Kepegawaian Daerah								
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP dan RB		100	17.802.571.000	APBD		100	7.448.339.304
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	20.500.000	APBD		100	15.880.000
5.03.01.2..01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang tersusun		4 Dok	12.500.000	APBD		4 Dokumen	15.880.000



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.01.2.02	Admnistrasi Keuangan perangkat Daerah	Presentase administrasi keuangan perangkat daerah		100	7.670.571.000	APBD		100	5.990.666.300
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang tersedia		1 tahun	7.647.571.000	APBD		12 bulan	5.990.666.300
'5.03.01.2.05	Admisnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase administrasi kepegawaian perangkat daerah		100	178.500.000	APBD		100	67.230.000
5.03.01.2.05.10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	jumlah penyelenggaraan dan jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan		70 Orang	75.000.000	APBD		70 Orang	67.230.000
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase administrasi		100	763.548.775	APBD		100	538.322.500

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		umum perangkat daerah							
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan		12 Jenis	64.354.775	APBD		8 paket	4.330.000
5.03.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	jenis bahan logistik kantor yang dibeli		80 Jenis	140.000.000	APBD		35 paket	200.000.000
5.03.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jenis barang yang dicetak dan digandakan		5 Paket	30.000.000	APBD		2 paket	15.000.000
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli		5 Jenis	20.000.000	APBD		2 dokumen	13.250.000
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi		15 Kali	20.745.000	APBD		4 laporan	5.742.500

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.01.2.06.09	Ppenyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diikuti		150 Kali	246.674.000	APBD		40 laporan	300.000.000
<b>5.03.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>		<b>100</b>	<b>441.746.550</b>	<b>APBD</b>		<b>100</b>	<b>80.015.504</b>
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin kantor yang dibeli		3 Jenis	219.192.800	APBD		24 unit	80.015.504
<b>5.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>		<b>100</b>	<b>428.375.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100</b>	<b>343.048.000</b>

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat masuk dan surat keluar, materai dan pengiriman dokumen		4 Jenis	26.000.000	APBD		3 laporan	2.000.000
5.03.01.2.08.02	penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	rekening jasa sumberdaya yang dibayar tiap bulan		3 Rekening	185.000.000	APBD		5 laporan	200.000.000
5.03.01.2.08.03	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jasa-jasa pelayanan umum yang dibayarkan		20 Ok	137.500.000	APBD		12 laporan	141.048.000
<b>5.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>		<b>100</b>	<b>255.200.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100</b>	<b>413.177.000</b>
5.03.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, dan pemeliharaan jasa biaya pajak	jasa dan jumlah pemeliharaan serta perizinan		80 Kali	74.600.000	APBD		-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	kendaraan dinas jabatan							
5.03.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	jasa dan jumlah pemeliharaan serta perizinan kendaraan dinas operasional		30 Kali	35.000.000	APBD		40 unit	139.010.000
5.03.01.2.09.03	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	jasa dan jumlah pemeliharaan serta perizinan alat besar		20 Kali	60.000.000	APBD		1 unit	30.150.000
5.03.01.2.09.08	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jenis peralatan dan mesin yang dipelihara		15 Unit	20.000.000	APBD		15 unit	140.908.000
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara		3 Unit	35.600.000	APBD		2 unit	103.109.000
	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>Presentase Mutasi, Rotasi, Promosi dan</b>		<b>100</b>	<b>8.038.629.675</b>	<b>APBD</b>		<b>100</b>	<b>3.935.229.446</b>

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pengembangan ASN							
5.03.02.2.01	Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Presentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		100	1.545.280.000	APBD		100	1.204.680.800
5.03.02.2.01.01	Prumusan bahan kebijakan pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pengadaan ASN						1 dokumen	1.000.000.000
5.03.02.2.01.02	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	jumlah dokumen ABK, formasi ASN, dan usulan kebutuhan formasi		1 Dok	61.550.000	APBD		1 dokumen	285.000.000
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	jumlah fasilitasi pengadaan PNS dan PPK		2 Kegiatan	1.000.000.000	APBD		2 dokumen	600.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.02.2.01.04	Evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN	Jumlah laporan hasil evaluasi pengadaan ASN						1 laporan	1.000.000.000
5.03.02.2.01.05	Perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN						2 dokumen	336.000
5.03.02.2.01.06	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	jumlah dokumen administrasi pemberhentian		400 Sk	87.880.000	APBD		610 dokumen	65.328.500
5.03.02.2.01.07	Evaluasi pemberhentian ASN	Jumlah dokumen hasil evaluasi pemberhentian ASN						1 dokumen	336.000
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi						1 lembaga	100.000
5.03.02.2.01.09	Perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan						1 dokumen	100.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pengelolaan data dan informasi ASN							
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	jumlah sistem informasi yang dikelola		1 Modul, 30 MBps, 4000 Record	171.000.000	APBD		3 dokumen	131.600.000
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan data kepegawaian	jumlah dokumen elektronik/jumlah ID card dan kartu pegawai/jumlah kegiatan perhitungan TPP/jumlah tata naskah kepegawian		5000 Dok, 400 Buah, 9 Keg, 5000 Lbr	133.000.000	APBD		4 dokumen	61.087.800
5.03.02.2.01.12	Evaluasi data, informasi dan sistem kepegawaian	jumlah buku ASN yang disusun dalam angka/jumlah evaluasi data informasi dan sistem informasi kepegawaian		75 Buah, 1 Kegiatan	56.000.000	APBD		2 laporan	58.792.500



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.02.2.02	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Presentase Mutasi dan Promosi ASN</b>		<b>100</b>	<b>1.030.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100</b>	<b>596.157.000</b>
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	jumlah PNS yang dimutasi		500 PNS	350.000.000	APBD		5 dokumen	60.000.000
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	jumlah keputusan kenaikan pangkat dan SPTKG yang terselesaikan		1200 KP, 4800 SPTKG	80.000.000	APBD		2 dokumen, 17 dokumen	122.157.000
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah PNS yang promosi		150 PNS	600.000.000	APBD		4 dokumen	414.000.000
<b>5.03.02.2.03</b>	<b>Pengembangan kompetensi ASN</b>	<b>Presentase pengembangan kompetensi ASN</b>		<b>100</b>	<b>5.068.846.500</b>	<b>APBD</b>		<b>100</b>	<b>1.431.100.000</b>
5.03.02.2.03.01	Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Jumlah dokumen AKPK/jumlah PNS yang mengikuti UKPPI dan ujian dinas		2 Dok, 200 PNS	51.244.000	APBD		200 orang	50.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan assesment center	Jumlah PNS yang mengikuti assesment		500 PNS	146.085.000	APBD		1 dokumen	300.000.000
5.03.02.2.03.03	Pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN						1 dokumen	100.000
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	jumlah pns yang mengikuti pendidikan lanjutan ijin belajar/jumlah pns yang mengikutipendidikan lanjutan tugas belajar		4 PNS, 150 PNS	500.000.000	APBD		3 orang	80.000.000
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	jumlah dokumen kerjasama/jumlah PNS yang mengikuti pelatihan		3 Dok, 342 CPNS	4.087.000.000	APBD		1735 dokumen	1.000.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.02.2.03.06	Fasilitasi sertifikasi jabatan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan fasilitasi sertifikasi jabatan						50 orang	100.000
5.03.02.2.03.07	Evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN	Jumlah laporan hasil evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN						1 laporan	100.000
5.03.02.2.03.08	Penyusunan adminitrasi diklat sertifikasi jabatn fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional						50 orang	100.000
5.03.02.2.03.09	Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat jabatan fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional						4 dokumen	100.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.02.2.03.10	Fasilitasi sertifikasi fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN						10 orang	100.000
5.03.02.2.03.11	Evaluasi diklat dan sertifikasi pejabat fungsional	Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional						1 laporan	100.000
5.03.02.2.03.12	Sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN						1 dokumen	100.000
5.03.02.2.03.13	Pembinaan jabatan fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina						50 orang	100.000
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi pengembangan karir dalam jabtan fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan						50 orang	100.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Layanan Pengembangan Karir							
5.03.02.2.03.15	Evaluasi pengembangan jabatan fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional						1 laporan	100.000
<b>5.03.02.2.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Presentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatur</b>		<b>100</b>	<b>394.503.175</b>	<b>APBD</b>		<b>100</b>	<b>703.291.646</b>
5.03.02.2.04.01	Penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						1 dokumen	100.000
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	jumlah kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja		13 Keg	65.850.000	APBD		1 dokumen	190.833.600

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.02.2.04.03	Evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	jumlah dokumen evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja		1 Dok	5.000.000	APBD		1 laporan	100.000
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	jumlah PNS yang terlayani dan jumlah PNS yang mendapat penghargaan		4 Orang, 600 PNS	75.600.000	APBD		2306 orang	157.944.000
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan tanda jasa bagi pegawai	jumlah tanda jasa yang disusulkan		100 Usulan	50.053.175	APBD		150 orang	24.000.000
5.03.02.2.04.06	Evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur	jumlah dokumen evaluasi pemberian penghargaan dan tanda jasa		1 Dok	5.000.000	APBD		1 dokumen	336.000
5.03.02.2.04.07	Pembinaan disiplin ASN	jumlah kegiatan pembinaan disiplin		7 Uji Kesehatan Kusus, 60 Keg, 150 Dok	90.000.000	APBD		36 orang	205.153.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Cuti, 500 LHKPN					
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	jumlah penyelesaian pelanggaran disiplin		20 Kasus	63.000.000	APBD		20 laporan	93.825.046
5.03.02.2.04.09	Pelayanan proses izin perceraian pegawai	Jumlah penyelesaian proses izin perceraian		25 Kasus	25.000.000	APBD		20 dokumen	30.000.000
5.03.02.2.04.10	Evaluasi disiplin ASN	Jumlah laporan hasil evaluasi disiplin ASN		1 Dok	5.000.000	APBD		1 laporan	1.000.000

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Sesuai dengan pasal 273 (3) Rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam menjalankan kegiatan untuk memenuhi target kinerja, Perangkat Daerah membutuhkan rencana kerja dan rencana pendanaan. Rencana kerja digunakan sebagai pedoman dan menjaga agar organisasi tetap berjalan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan, dan pendanaan timbul sebagai dampak atas dilaksanakannya kegiatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Oleh karena itu, dua hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Berikut ini akan disajikan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kepegawaian Daerah untuk Tahun 2024. Penyusunan rencana kerja berdasarkan target capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana tabel terlampir :



**Tabel 4.1**

**Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kepegawian Daerah  
Kabupaten Pematang Tahun 2024**

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
					2023		2024		
					Target	Rp	Target	Rp	
1.	Meningkatkan tertib administrasi, manajemen dan pelayanan kepegawaian daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya								BKD
		Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen kepegawaian yang handal				17.802.571.000		11.383.568.750	
			Program Penunjang Urusan Pemeintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten Pematang	100	9.763.941.325	61,55	7.448.339.304	

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
					2023		2024		
					Target	Rp	Target	Rp	
			<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>20.500.000</b>	<b>100</b>	<b>15.880.000</b>	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang tersusun	4 dok	12.500.000	4 dok	15.880.000	
			<b>Admnistrasi Keuangan perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>100</b>	<b>7.670.571.000</b>	<b>100</b>	<b>5.990.666.300</b>	
			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	1 tahun	7.647.571.000	1 tahun	5.990.666.300	
			<b>Admisnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100</b>	<b>178.500.000</b>	<b>100</b>	<b>67.230.000</b>	
			Sosialisasi peraturan perundangan-undangan	jumlah penyelenggaraan dan jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	70 orang	75.000.000	70 orang	67.230.000	

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
					2023		2024		
					Target	Rp	Target	Rp	
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100</b>	<b>763.548.775</b>	<b>100</b>	<b>538.322.500</b>	
			Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	12 jenis	64.354.775	8 paket	4.330.000	
			Penyediaan bahan logistik kantor	jenis bahan logistik kantor yang dibeli	80 jenis	140.000.000	35 paket	200.000.000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jenis barang yang dicetak dan digandakan	5 paket	30.000.000	2 paket	15.000.000	
			Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli	5 jenis	20.000.000	2 dokumen	13.250.000	

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
					2023		2024		
					Target	Rp	Target	Rp	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	15 kali	7.500.000	4 laporan	5.742.500	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diikuti	150 kali	246.674.000	40 laporan	300.000.000	
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100</b>	<b>441.746.550</b>	<b>100</b>	<b>80.015.504</b>	
			Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin kantor yang dibeli	3 jenis	219.192.800	24 unit	343.048.000	
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100</b>	<b>428.375.000</b>	<b>100</b>	<b>2.000.000</b>	
			Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat masuk dan surat keluar, materai dan pengiriman dokumen	4 jenis	26.000.000	5 laporan	200.000.000	

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
					2023		2024		
					Target	Rp	Target	Rp	
			penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	rekening jasa sumberdaya yang dibayar tiap bulan	3 rekening	246.674.000	12 laporan	141.048.000	
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jasa-jasa pelayanan umum yang dibayarkan	20 ok	137.500.000	12 laporan	141.048.000	
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100</b>	<b>255.200.000</b>	<b>100</b>	<b>413.177.000</b>	
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	jasa dan jumlah pemeliharaan serta perizinan kendaraan dinas jabatan	80 kali	74.600.000	40 unit	0	

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
					2023		2024		
					Target	Rp	Target	Rp	
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	jasa dan jumlah pemeliharaan serta perizinan kendaraan dinas operasional	30 kali	35.000.000	40 kali	139.010.000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	jasa dan jumlah pemeliharaan serta perizinan alat besar	20 kali	60.000.000	1 unit	30.150.000	
			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	15 unit	20.000.000	15 unit	140.908.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 unit	35.600.000	2 unit	103.109.000	
			<b>Program Kepegawaian</b>	Persentase Mutasi, Rotasi, Promosi dan Pengembangan ASN	<b>100</b>	<b>8.038.629.675</b>	<b>100</b>	<b>3.935.229.446</b>	
			Prumusan bahan kebijakan pengadaan ASN				1 dokumen	1.000.000	

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
					2023		2024		
					Target	Rp	Target	Rp	
			<b>Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN</b>	<b>Persentase Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN</b>	<b>100</b>	<b>1.545.280.000</b>	<b>100</b>	<b>1.204.680.800</b>	
			Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	jumlah dokumen ABK, formasi ASN, dan usulan kebutuhan formasi	1 dok	61.550.000	1 dok	285.000.000	
			Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	jumlah fasilitasi pengadaan PNS dan PPK	2 keg	1.005.000.000	2 dokumen	600.000.000	
			Evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN	Jumlah laporan hasil evaluasi pengadaan ASN			1 laporan	1.000.000	

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
					2023		2024		
					Target	Rp	Target	Rp	
			Perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN	Jumlah dokumen hasil perumusan bhan kebijakan pemberhentian ASN			2 dokumen	336.000	
			Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	jumlah dokumen administrasi pemberhentian	400 sk	87.880.000	610 dokumen	65.328.500	
			Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	jumlah sistem informasi yang dikelola	1 modul, 30 MBps, 4.000 record	171.000.000	3 dokumen	131.600.000	
			Pengelolaan data kepegawaian	jumlah dokumen elektronik/jumlah ID card dan kartu pegawai/jumlah kegiatan perhitungan TPP/jumlah tata naskah kepegawian	5000 dok, 400 buah, 9 keg, 5000 lbr	133.000.000	4 dokumen	61.087.800	
			Evaluasi data, informasi dan sistem kepegawaian	jumlah buku ASN yang disusun dalam angka/jumlah evaluasi data informasi dan sistem informasi kepegawaian	75 buah, 1 keg	56.000.000	2 laporan	58.792.500	
			<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Persentase Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>100</b>	<b>1.030.000.000</b>	<b>100</b>	<b>596.157.000</b>	



NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
					2023		2024		
					Target	Rp	Target	Rp	
			Pengelolaan Mutasi ASN	jumlah PNS yang dimutasi	520 pns	350.000.000	5 dokumen	60.000.000	
			Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	jumlah keputusan kenaikan pangkat dan SPTKG yang terselesaikan	1.200 kp 4.800 sptkg	80.000.000	2 dokumen, 17 dokumen	122.157.000	
			Pengelolaan promosi ASN	Jumlah PNS yang promosi	140 PNS	600.000.000	4 dok	414.000.000	
			<b>Pengembangan kompetensi ASN</b>	<b>Persentase pengembangan kompetensi ASN</b>	<b>100</b>	<b>5.068.846.500</b>	<b>100</b>	<b>1.431.100.000</b>	
			Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Jumlah dokumen AKPK/jumlah PNS yang mengikuti UKPPI dan ujian dinas	2 dok, 200 pns	51.244.000	200 orang	50.000.000	
			Pengelolaan assesment center	Jumlah PNS yang mengikuti assessment	500 pns	146.085.000	1 dok	300.000.000	
			Pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN						

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
					2023		2024		
					Target	Rp	Target	Rp	
			Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	jumlah pns yang mengikuti pendidikan lanjutan ijin belajar/jumlah pns yang mengikutipendidikan lanjutan tugas belajar	4 pns 150 pns	500.000.000	3 orang	80.000.000	
			Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	jumlah dokumen kerjasama/jumlah PNS yang mengikuti pelatihan	3 dok, 342 cpns	4.087.000.000	1735 dok	1.000.000.000	
			Fasilitasi sertifikasi jabatan ASN	jumlah ASN yang mendapatkan layanan fasilitasi sertifikasi jabatan			50 orang	100.0000	
			Evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN	jumlah laporan hasil evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN			1 Laporan	100.000	
			Sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN	jumlah dokumen hasil evaluasi sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN			1 Dokumen	100.000	
			Pembinaan jabatan fungsional ASN	Jumlah ASN fungsional yang dibina			50 orang	100.000	

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
					2023		2024		
					Target	Rp	Target	Rp	
			Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir			50 orang	100.000	
			Evaluasi pengembangan jabatan fungsional	Jumlah dokumen hasil evaluasi pengembangan jabatan fungsional			1 laporan	100.000	
			<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Persentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatur</b>	<b>100</b>	<b>786.856.000</b>			
			Penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur						
			Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	jumlah kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja	13 keg	318.056.000	1 dokumen	190.833.600	
			Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	jumlah PNS yang terlayani dan jumlah PNS yang mendapat penghargaan	4 org 600 pns	75.600.000	2306 orang	157.944.000	
			Pengelolaan tanda jasa bagi pegawai	jumlah tanda jasa yang disusulkan	100 usulan	40.000.000	150 orang	24.000.000	
			Pembinaan disiplin ASN	jumlah kegiatan pembinaan disiplin	7 uji kesehatan khusus	90.000.000	36 orang	205.153.000	

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
					2023		2024		
					Target	Rp	Target	Rp	
					60 keg 150 dok cuti 500 LHKPN				
			Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	jumlah penyelesaian pelanggaran disiplin	20 kasus	63.000.000	20 laporan	93.825.046	
			Pelayanan proses izin perceraian pegawai	Jumlah penyelesaian proses ijin perceraian	25 kasus	25.000.000	20 dokumen	30.000.000	
			Evaluasi disiplin ASN	Jumlah laporan hasil evaluasi disiplin ASN			1 Laporan	1.000.000	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2024 disusun berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun 2023.

Renja (Rencana Kerja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang memuat sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih *indikatif* sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia. Seluruh elemen pelaksana di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang wajib menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas serta partisipasi dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja ini.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran, mensyaratkan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu bidang dan lintas bidang, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dengan tersusunnya Rencana Kerja ( Renja ) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKA maupun DPA untuk tahun yang akan datang.